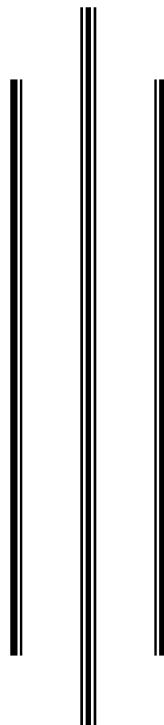




**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023**





KEPUTUSAN ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT

Nomor : Kep/14/VIII/REN.2.3./2022

Tentang

RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH SUMATERA BARAT

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menetapkan Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor;
7. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/347/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Renstra Polda Sumbar Tahun 2020-2024.

2 KEPUTUSAN IRWADA POLDA SUMBAR
NOMOR : KEP/14/VIII/REN.2.3./2022
TANGGAL: 23 AGUSTUS 2022

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kapolda Sumbar Nomor: Kep/313/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Rencana Kerja Kepolisian Daerah Sumatera Barat TA. 2023;
 2. Pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar T.A. 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN IRWASDA POLDA SUMATERA BARAT TENTANG RENCANA KERJA ITWASDA POLDA SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2023.

1. Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan sebagai Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal: Agustus 2022

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LATAR BERLAKANG	
1. Kondisi Umum	1
a. Perkembangan Aspek Kehidupan	3
b. Analisis	13
2. Identifikasi Masalah	14
II. TUJUAN DAN SASARAN	
3. Visi dan Misi	14
a. Visi Polda Sumbar dan Visi Itwasda Polda Sumbar	14
b. Misi Polda Sumbar dan Misi Itwasda Polda Sumbar	15
4. Tujuan	16
a. Tujuan Polda Sumbar Tahun 2023	16
b. Tujuan Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023	16
5. Sasaran Prioritas Tahun 2023	17
a. Sasaran Prioritas Polda Sumbar	17
b. Sasaran Prioritas Itwasda Polda Sumbar	17
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sumbar Tahun 2023	17
7. Arah Kebijakan dan Strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023 ..	40
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	
8. Program kegiatan	42
9. Pagu Indikatif	43
V. PENUTUP	
10. Penutup	44
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. RKT	
2. RKA-KL	

RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023

I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari tahapan Rencana Strategis Itwasda Polda Sumbar 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar Tahun 2022 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023. Rencana Kerja Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategi Itwasda Polda Sumbar 2020-2024, disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Polda Sumbar Tahun 2022.

Itwasda bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal. Dalam melaksanakan tugas Itwasda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. Pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - 1) Audit penyelenggaraan manajemen di bidang operasional, Sumber Daya Manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (Garkeu);
 - 2) Reviu;
 - 3) Pemantauan Tindak Lanjut (PTL); dan
 - 4) Evaluasi.
- c. pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi;

c. pemberian.....

- d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada Polri; dan
- f. pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Itwasda Polda Sumbar di dukung oleh Subbag dan Irbid. Tugas dan fungsi Subbag dan Irbid dapat kita lihat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah.

Itwasda Polda Sumbar telah menunjukkan keberhasilan melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan indikator, menurunnya pelanggaran atau kesalahan administrasi, terlaksananya Operasi Kepolisian di Jajaran Polda Sumbar berjalan sebagaimana aturan yang berlaku, menurunnya jumlah pengaduan masyarakat atas perilaku anggota Polri khususnya Polda Sumbar dilapangan, terlaksananya kegiatan verifikasi, terwujudnya laporan satuan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta mewujudkan pelayanan maksimal terhadap setiap pengaduan dari masyarakat.

Perkembangan lingkungan strategis harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbud dan keamanan yang senantiasa berubah disetiap daerah. Semua isu strategis baik global, nasional dan regional tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Ranrenja Itwasda Polda Sumbar T.A.2023.

Dalam perkembangan lingkungan masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan, baik darat maupun laut, pencemaran lingkungan, penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19), pemberlakuan MEA, pengiriman TKI maupun penerimaan TKA dan perkembangan paham radikalisme serta terorisme.

Untuk pencapaian keberhasilan kinerja Itwasda Polda Sumatera Barat tahun 2023, perlu adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat yang diwujudkan

Untuk

dalam bentuk kerjasama antara Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai yang dikenal sebagai filosofi "*Tungku Tigo Sajaringan, Tali Tigo Sapilin*", artinya Itwasda Polda Sumatera Barat harus membangun hubungan kerjasama dan bersinergitas dengan seluruh *stake holder* agar membantu Polda Sumbar dalam pencapaian terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Untuk mewujudkan kondisi tersebut di atas maka dijabarkan dalam program dan kegiatan serta anggaran yang mengacu kepada sasaran prioritas, arah kebijakan dan strategi Itwasda Polda Sumbar tahun 2023.

Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Itwasda Polda Sumatera Barat yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang akan digambarkan sebagai berikut:

a. Perkembangan Aspek Kehidupan

1) Geografi

- a) Propinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' Lintang Utara sampai 3°30' Lintang Selatan serta 98°36' sampai 101°53' Bujur Timur dengan luas total wilayah sekitar 42.012,89 Km² atau luas tersebut setara dengan 2,17 % dari luas Republik Indonesia, propinsi Sumatera barat terletak disebelah barat pulau Sumatera.
- b) Provinsi Sumatera Barat memiliki luas total sekitar 42.297,30 Km² dan sebagian wilayah yang menghadap ke arah Samudera Indonesia yang pengelolaan pengamanannya relatif lemah karena sarana dan prasarana yang dimiliki relatif kecil sehingga mudah orang asing memasuki wilayah perairan Sumatera Barat dengan aman tanpa diketahui oleh petugas keamanan hal tersebut bila kedepan tidak ada penambahan sarana dan prasarana yang memadai dapat berpotensi terjadinya pencurian hasil laut oleh nelayan asing dengan menggunakan pukat harimau, sedangkan kondisi wilayah daratan Sumatera Barat sebagai poros yang menghubungkan beberapa provinsi tetangga seperti prov. Sumut, Prov.Riau, Prov jambi dan Prov Bengkulu. memudahkan para pelaku kejahatan di Sumbar untuk melarikan diri dan menyimpan barang bukti hasil kejahatan keluar daerah.

c) Sumatera.....

- c) Sumatera Barat merupakan daerah rentan terjadinya gempa bumi baik didarat maupun dilaut disebabkan karena wilayah sumbar terletak diatas lempeng eurasia dan lempeng australia yang mempunyai beberapa retakan antara lain: retakan/patahan disepanjang pulau sumatera (patahan semangka) mulai dari wilayah Aceh sampai ke Lampung dan adanya retakan/patahanMentawai Antara pulau Sumatera dengan Pulau Mentawai serta patahan sebelah barat pulau Mentawai (bagian barat kep. mentawai (antara batas lempeng eurasia dgn lempeng australia / zona subduksi sumatera) dimana lempeng australia bergerak mendorong lempeng eurasia dgn. kecepatan ± 7 cm / tahun ke arah timur laut serta adanya 2 (dua) gunung yang masih aktif Gunung Merapi dan gunung Talang yang sewaktu-waktu bisa terjadi gempa bumi/tsunami.
- d) Geografi Sumatera Barat meliputi bukit dan pegunungan ,dengan maraknya kasus illegal logging atau pembabatan hutan secara besar-besaran untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan oleh sebagian masyarakat di Sumatera Barat karena minimnya pengawasan, bila hal ini pemerintah daerah setempat tidak segera mengambil langkah – langkah nyata untuk mengatasi hal tesebut maka diperkirakan pada tahun 2020 mendatang cadangan huntan yang ada di Sumbar semakin menipis, bila hal ini terjadi berdampak sangat luas disamping hutan tidak mampu manahan resapan air hujan sehingga dapat menimbulkan bencana alam banjir, tanah longsor, dampak lain adalah tidak teraturnya suhu/ iklim di Sumbar sendiri yang dapat mempengaruhi cuaca yang tidak teratur dan susah diprediksi.
- e) Propinsi Sumbar memiliki 2 (dua) musim kemarau dan musim hujan, yang berpotensi menimbulkan ancaman banjir, tanah longsor, bencana kekeringan atau kebakaran hutan, sehingga perlunya antisipasi terhadap permasalahan musim tersebut karena hal tersebut pasti akan terjadi untuk meminimalisir terjadinya kerugian harta benda maupun jiwa.

2) Demografi

- a) Jumlah penduduk Sumbar Propvinsi Sumbar tahun 2020 mencapai 5.441.197 jiwa terdiri laki-laki sebanyak 2.711.772 orang dan penduduk perempuan sebanyak 2.729.425 orang diperkirakan pada tahun 2021 bila pemerintah tidak melakukan langkah-langkah penanggulangan maka jumlah penduduk di Sumbar bisa mencapai 5.606.781 jiwa, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dapat menyebabkan didaerah-daerah

tertentu

tertentu terjadi kepadatan penduduk serta tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan hidup manusia lainnya, merupakan potensi terhadap terjadinya berbagai masalah sosial dan keamanan dengan demensi yang sangat kompleks.

- b) Komposisi penduduk Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas beragama Islam, keadaan tersebut akan berpengaruh terhadap pola pikir dan landasan moral serta sepirtual masyarakat. Walaupun keberadaan agama lainnya yang berada di wilayah sumbar tetap memperoleh tempat untuk berkembang, Sikap solidaritas dan kerukunan hidup antar umat beragama masih tetap terpelihara, hal ini menjadi salah satu potensi yang menguntungkan bagi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat yang tetap dipertahankan, namun apabila pemerintah kurang mempertimbangkan kepentingan adanya perbedaan tersebut cenderung akan menimbulkan kerawanan berupa terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan tersebut antara lain terjadinya konflik horizontal atau vertikal.

3) Sumber Daya Alam

- a) Kondisi Sumber daya alam di Sumatera Barat belum bisa dikelola secara optimal karena terbatasnya sumber daya manusia yang handal/profesional yang seharusnya bisa dikelola dengan optimal dalam rangka sebagai pemasukan devisa negara ataupun peningkatan ekonomi rakyat Sumbar itu sendiri sehingga apabila hal tersebut tidak dikelola dan diamankan dengan baik maka dapat berpotensi menjadi gangguan nyata seperti :
- Pencurian kayu hutan lindung.
 - Pengrusakan lingkungan.
 - Pencurian Ikan oleh kapal asing.
 - Pencurian terumbu karang.
 - Penyerobotan pulau kecil oleh Negara Asing.
 - Sabotase kebakaran hutan.
 - Banjir dan tanah longsor.
- b) Tumpang tindihnya kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah masih menjadi permasalahan yang mengarah terjadinya konflik sosial dilapangan, sehingga hal tersebut sering dijadikan celah/titik kelemahan oleh sekelompok masyarakat untuk melakukan kegiatan secara illegal untuk keperluan dan kepentingan individu maupun kelompoknya sendiri.

4) Ideologi

4) Ideologi

- a) Berkembangnya berbagai aliran kepercayaan di beberapa daerah di Indonesia yang terindikasi menginginkan adanya perubahan ideologi Pancasila menjadi syariah Islam, hal tersebut sangat bertentangan dengan isi dari sila-sila Pancasila sebagai satu-satunya azas bernegara di Indonesia, Kelompok islam ini akan terus berupaya menyebarkan pengaruhnya termasuk ke wilayah Sumbar sehingga rentan terjadinya konflik horizontal.
- b) Sebagai dampak reformasi saat ini dimana masyarakat merasa mendapat suatu kebebasan dalam berdemokrasi khususnya dalam membentuk suatu organisasi tertentu sesuai dengan keinginan pribadi maupun kelompoknya masing-masing sehingga mengandung potensi kerawanan masyarakat yang dapat menyebabkan timbulnya konflik horizontal maupun vertikal. ataupun kelompok lain yang ingin menghidupkan kembali faham komunisme seperti Yayasan Penelitian Korban Peristiwa 1965/1966 (YPKP) yang telah muncul di wilayah Sumatera Barat sejak tahun 2012 dan kegiatannya di wilayah Sumatera Barat mendapat protes dan ditentang masyarakat setempat.

5) Politik

- a) Sistem Politik dalam negeri menganut sistem demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan azas musyawarah untuk mencapai mufakat, namun masih adanya indikasi kelompok tertentu untuk tetap melanjutkan amandemen UUD 1945 antara lain:
 - (1) Kelompok yang ingin kembali ke UUD 1945.
 - (2) Kelompok yang menginginkan perubahan/amandemen secara berlanjut.
 - (3) Kelompok yang menginginkan dikaji ulang hasil amandemen UUD 1945.
- b) Otonomi khusus berdampak positif terhadap peningkatan APBD yang cukup signifikan, namun manfaat otonomi khusus belum dapat dirasakan langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- c) Pemekaran wilayah menimbulkan berbagai permasalahan karena prosesnya terkesan dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh di daerah tersebut dengan berusaha mencari dukungan berbagai pihak, baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat dan kerap mengabaikan pentahapan serta mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip

prinsip daerah otonomi seperti batas wilayah partisipasi rakyat dan sumber daya yang dimiliki.

- d) Dampak lain dari pemekaran wilayah antara lain terjadinya permasalahan seperti perebutan Batas wilayah kota Bukittinggi dengan Kab. Agam yang sampai saat ini masih belum memiliki kejelasan wilayah administratif akibat di keluarkannya PP 84 tahun 1999 yang menetapkan 3 kecamatan Kab. Agam (Kec. Tilkam, Kec. Biaro dan Kec. Banuhampu) masuk ke wilayah Kota Bukittinggi. Sedangkan Tokoh masyarakat dan masyarakat dari ketiga kecamatan menolak penyatuan 3 kecamatan yang dapat berdampak pada menurunnya pendapatan daerah masyarakat yang kemudian memberikan usulan agar 4 kecamatan. Kab. Agam lainnya (Kec. Baso, Kec. IV Koto, Kec. Palupuh dan Kec. Sungai Puar) untuk ikut dimasukkan dalam wilayah Kota Bukittinggi namun pengusulan tidak mendapat realisasi dari Pemerintah Pusat sehingga timbul keinginan masyarakat 7 kecamatan Kab. Agam Timur untuk membentuk Kab. Agam Tuo dengan cara memisahkan diri dari wilayah Kab. Agam Barat disamping itu juga terjadi pro kontra antara masyarakat Agam Timur dengan masyarakat Agam Barat dan tidak masuk wilayah Kota Bukittinggi. Kab. Agam terbagi dari wilayah Agam Barat dan Agam Timur. Agam Timur terdiri dari 10 (Sepuluh) Kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) Nagari, rencana pembentukan Kabupaten baru di Agam Timur yang telah didukung oleh DPRD Agam dari tahun 2007 karena Agam Timur terlalu jauh dari pusat pemerintahan Kab. Agam. Wacana tersebut sampai saat ini tidak kunjung selesai sehingga masih menyisakan permasalahan setiap tahunnya dan berpotensi terjadinya konflik sosial dimasyarakat
- e) Kondisi suprastruktur politik saat ini yang memiliki lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara berpotensi terjadinya korupsi yang melibatkan aparatur negara dan pejabat pemerintah.
- f) Netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat adanya aturan bahwa partai politik berhak menetapkan calon pimpinan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- g) Pelayanan publik yang dianggap belum baik sebagai akibat sikap mental yang masih berorientasi kepada kepentingan pribadi, tanggung jawab badan/lembaga masih tumpang tindih serta birokrat belum mendapat imbalan yang memadai sesuai yang diharapkan sehingga sering terjadinya penyalahgunaan kewenangan

kewenangan korupsi ataupun manipulasi di beberapa instansi pemerintah maupun swasta.

- h) Budaya Politik dalam sistem Politik Nasional yang aktualisasinya masih belum mencerminkan kehidupan budaya politik yang berdasarkan Pancasila, dimana budaya politik yang berkembang lebih cenderung terjadinya budaya transaksional politik dikalangan partai politik dan elite politik dalam memperjuangkan tujuan politiknya.
- i) Menurunnya persatuan dan kesatuan bangsa yang dipengaruhi oleh primordial kedaerahan berpotensi terhadap menurunnya Nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang sempit dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga rentan terjadinya disintegrasi bangsa.
- j) Penegakan hukum masih akan dihadapkan pada integritas, moralitas dan profesionalisme penegak hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang transparan, akuntabel dan berkeadilan kurang dirasakan oleh masyarakat kecil hal tersebut terbukti masih sering terjadinya aparat penegak hukum yang tertangkap melakukan jual beli kasus atau terlibat kasus-kasus tertentu yang dapat menciderai rakyat.

6) Ekonomi

- a) Krisis Global yang melanda seluruh Bangsa baik Negara maju maupun Negara berkembang juga dirasakan oleh Negara Indonesia dan Sumbar pada khususnya diperkirakan pada tahun 2023 masih akan mempengaruhi kinerja perekonomian nasional maupun daerah , arus investasi masih akan menghadapi berbagai permasalahan perkembangan industri dalam negeri sehingga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi baik secara nasional maupun lokal.
- b) Fluktuasi harga minyak mentah dunia yang tidak stabil serta makin menipisnya cadangan minyak dalam negeri diperkirakan akan mempengaruhi situasi dan kondisi nasional maupun daerah pada tahun 2023 mendatang dan berpotensi menimbulkan tidak stabilnya harga barang kebutuhan pokok serta naiknya ongkos transportasi yang dinilai memberatkan masyarakat kalangan kelas menengah kebawah.

c) Meningkatnya

- c) Meningkatnya kebutuhan konsumsi listrik untuk industri dan rumah tangga yang tidak diimbangi dengan penambahan produksi listrik (PLTA) sesuai kebutuhan serta terjadinya musim kemarau panjang mengakibatkan berkurangnya suplay listrik kepada konsumen sehingga terjadinya pemutusan arus secara bergiliran.
- d) Kebijakan di bidang transportasi dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor disemua jenis serta adanya program pemerintah tentang mobil murah yang tidak diimbangi dengan infrastruktur jalan yang mendukung sehingga berdampak terhadap timbulnya berbagai permasalahan di bidang transportasi seperti kemacetan , kesremawutan jalan, naiknya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas.
- e) Pengelolaan fungsi hutan yang tidak disertai dengan upaya pelestariannya menjadi potensi kerugian negara serta munculnya berbagai permasalahan seperti perusakan lingkungan hidup merupakan faktor utama terjadinya bencana alam banjir dan tanah longsor.
- f) Masalah ketenagakerjaan masih dihadapkan sempitnya lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang tersedia yang disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia pekerja yang tidak memenuhi standarisasi lapangan kerja yang tersedia sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan semakin meningkat dan berpotensi timbulnya gangguan kamtibmas.
- g) Kebijakan Otonomi Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam masih dihadapkan pada kewenangan pengelolaan sumber daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga terjadinya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- h) Permasalahan dibidang pertanian di sumbar masih dhadapkan kepada masalah iklim yang ekstrim dan kebijakan masalah publik serta masalah sengketa lahan pertanian serta lemahnya pengawasan khususnya batas teritorial kelautan dan perikanan ,peningkatan kesejahteraan nelayan serta masih lemahnya penegakan hukum menjadi potensi meningkatnya gangguan kamtibmas baik bersumber dibidang pertanian maupun sumber kekayaan laut dan habitatnya sehingga kekayaan laut sering di curi oleh kapal – kapal asing.

7) Sosial Budaya

- a) Masyarakat Minangkabau yang hidup di lingkungan adat dan budaya yang khas memiliki falsafah hidup adat yang berdasarkan “Adat Basandi sara’ dan sara’ basandi Kitabullah”. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi juga telah ikut menerpa masyarakat Sumatera Barat yang berakibat terjadinya perubahan-perubahan sosial atau terjadi pergeseran status sosial ditengah-tengah masyarakat yg dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi timbulnya gangguan kantibmas atau kriminalitas.
- b) Keragaman etnis agama, suku dan ras selain merupakan aset negara bila hal tersebut tidak dikelola secara baik dapat merupakan potensi bagi terjadinya konflik yang berlatar belakang perbedaan yang ada .
- c) Keberhasilan pengungkapan terorisme oleh Desus 88 telah mendapat apresiasi dari negara-negara di dunia karena di Indonesia telah benar-benar serius menangani masalah terorisme , namun karena jaringan terorisme di Indonesia telah mengakar sampai ke tingkat masyarakat paling bawah sehingga diperkirakan beberapa tahun kedepan ancaman terorisme di Indonesia masih tetap tinggi dan perlu kewaspadaan aparat keamanan.
- d) Penebangan liar di hutan terutama dilokasi serapan air ,dapat berakibat kepada timbulnya tanah longsor/banjir bandang pada waktu musim hujan yang dapat menimbulkan korban harta benda dan jiwa, serta rusaknya ekosistem disekitar lokasi hutan.
- e) Pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar lahan pada musim kemarau, dapat mengakibatkan timbulnya kabut asap yang pekat, sehingga mengganggu kesehatan dan transportasi perhubungan baik darat,laut dan udara serta mendapatkan konplain dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darusalam.
- f) Sengketa pertanahan/agraria yang dilatarbelakangi oleh status kepemilikan tanah baik secara perorangan maupun kelompok yang tanpa disertai oleh dokumen kepemilikan atau penerbitan surat tanah/sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional setempat,atau pemerintah daerah setempat menimbulkan sengketa yang berdampak terjadiya konflik horisontal maupun vertical.

8) Keamanan

8) Keamanan

Permasalahan di bidang keamanan yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan tahun 2023 meliputi:

- a) Tingkat kesadaran kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum yang masih rendah, sehingga pelanggaran hukum dianggap hal yang biasa dan adanya kecenderungan dalam menangani masalah keamanan dimana masyarakat bertindak main hakim sendiri.
- b) Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa masalah keamanan merupakan tugas aparat keamanan sehingga hal ini mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membangun sistem keamanan dilingkungan masyarakat.
- c) Kurangnya peran pranata sosial dalam membangun keamanan disertai anggapan bahwa masalah keamanan segalanya bisa diatur dan ditentukan adat setempat, serta tingkat pemahaman tentang keamanan dan kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah sehingga penerapan hukum positif menjadi kurang maksimal.
- d) Belum optimalnya penegakan hukum yang berkeadilan sehingga mempengaruhi kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.
- e) Berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat baik yang bersumber dari kondisi sosial politik, sosial ekonomi maupun sosial budaya yang berdampak pada masalah keamanan.

Kerawanan daerah yang perlu mendapat perhatian.

Kerawanan daerah berdasarkan analisis jenis kejahatan yang terjadi di beberapa wilayah Kab/Kota di Sumbar dan menjadi prioritas untuk mendapat perhatian antara lain :

- a) Polresta Padang kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Perkosaan, Pengrusakan, Penipuan, Pembakaran/kebakaran, Narkoba, judi, tetorisme, Korupsi, Unjuk Rasa, dan Perkelahian antar Pelajar, banjir/tanah longsor , gempa bumi / tsunami ,pelanggaran OA dan Laka Lantas.
- b) Polres Padang Pariaman kerawanannya adalah : Curat, Curas, curanmor, judi,pencurian ikan, Perkosaan, Pengrusakan, Narkoba, Unjuk Rasa , terorisme, penyelundupan ,perkelahian ,illegal logging gempa bumi/tsunami dan Laka Lantas.
- c) Polres Pessel Kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Anirat, Pengrusakan, penipuan,pembakaran, judi, narkoba, Illegal logging, penyelundupan, gempa bumi dan tsunami.

d) Polres

- d) Polres Bukittinggi kerawanannya adalah : Curat, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Perkosaan, Pengrusakan, Penipuan, Narkoba, Unjuk Rasa, Laka Lantas, Korupsi ,gempa bumi dan Perkelahian antara Pelajar,teror.
- e) Polres Payakumbuh kerawanannya : Curas, Curat, Curanmor, Narkoba, Perjudian, Unjuk rasa,.penyelundupan, OA, dan laka lantas.
- f) Polres Pasaman Barat kerawanannya adalah : Curat, curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, judi,perkelahian Antar Nagari, Illegal Logging, illegal Mining, Laka Lantas. Gempa bumi/tsunami. Konflik Sosial dan konflik Perkebunan.
- g) Polres Solok kerawanannya adalah : Curat, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, Rusuh massal / antar nagari, Unjuk Rasa, Laka Lantas, dan Korupsi. Ilegal Mining dan Konflik Sosial.
- h) Polres Dharmasraya kerawanannya adalah : curat, curas, curanmor, penipuan, penganiayaan, kebakaran / pembakaran, Illegal logging, illegal mining,perkelahian antara kampung, perkelahian antar suku, senpi / handak, Rusuh Massal, Narkoba dan laka lantas serta Konflik lahan perkebunan.
- i) Polres Solok Kota kerawanannya : Curas, Curat, Curanmor, Unjuk rasa, kebakaran, perkosaan /pencabulan, kebakaran/pembakaran perkelahian antar kampung,narkoba ,gempa bumi laka lantas.
- j) Polres Pariaman Kota kerawanannya adalah :Curat, curas, curanmor, pengrusakan, penipuan, kebakaran, perjudian, narkoba korupsi, pencurian ikan, gempa/tsunami dan laka lantas.
- k) Polres 50 Kota kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Anirat, illegal logging, Perkosaan, Penipuan, Narkoba, Unjuk Rasa, Laka Lantas dan Korupsi.
- l) Polres Solok Selatan kerawanannya : Illegal logging, Curas, Curat, Curanmor, pengrusakan, penipuan, perkelahian, kebakaran/pembakaran, senpi/handak, illegal logging, illegal minning, Rusuh massal, laka lantas.
- m) Polres Tanah Datar kerawanannya adalah : Curat, curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Masal / antar nagari, Laka Lantas, dan Korupsi, gempa bumi.
- n) Polres Padang Panjang kerawanannya adalah : Curat, curas,curanmor, anirat, Kebakaran/pembakaran, Narkoba, perkelahian, gempa bumi, lakalantas.

o) Polres.....

- o) Polres Agam kerawanannya adalah : Curat, Curas, Pembunuhan, Perkosaan, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Massa/antar nagari, tanah longsor / bencana alam, Laka Lantas dan konflik lahan perkebunan.
- p) Polres Pasaman kerawanannya adalah : Curat, Curas, Curanmor, Pembunuhan, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran / kebakaran, Narkoba, judi, perkelahian Antar Nagari, Illegal Logging, ilegal Mining.
- q) Polres Sawahlunto kerawanannya adalah: Curat, Curanmor, Anirat, Pengrusakan, Pembakaran, Narkoba, Unjuk Rasa, Illegal Logging, Peti, dan Laka Lantas, Konflik Lahan/Perkebunan.
- r) Polres Sijunjung kerawanannya; Illegal Logging, Illegal minning, curat, Curas, curanmor, Kebakaran, Narkoba, Unjuk Rasa, Rusuh Massal, laka lantas. Konflik Lahan/Perkebunan.
- s) Polres Mentawai kerawanannya adalah: kasus Illegal Logging, penyelundupan, pencurian ikan, perkelahian, terorisme, pelanggaran OA.

b. Analisis

Pelaksanaan tugas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari internal dan eksternal, sehingga perlu untuk dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan formula yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi. Penilaian AKIP Itwasda Polda Sumbar tahun 2021 oleh APIP Polda Sumbar mendapat kategori B (72,48). Adapun kondisi eksternal yang dihadapi antara lain ketertiban masyarakat semakin dinamis dan dapat terjadi setiap saat dan waktu sebagai dampak akibat pengaruh dari penyebaran *Covid-19*, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. Tren peningkatan kejahatan, Curat, Curas, Curanmor, Penipuan, Narkoba dan Kriminal lainnya yang menuntut Polri untuk lebih optimal dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum.

2. Identifikasi

2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Itwasda Polda Sumbar seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, nasional dan regional akan semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalisme kinerja dan pelayanan di bidang kepolisian semakin tinggi, mengharuskan menyusun berbagai upaya dan aksi konkrit yang efektif dalam membantu mewujudkan Kaamanan di Provinsi Sumatera Barat. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polda Sumatera Barat pada Tahun 2023 dan khususnya pada satker Itwasda Polda Sumbar adalah sebagai berikut:

- a. Dampak ekonomi dari akibat adanya penyebaran *Covid-19* yang turut mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga menuntut Itwasda sebagai APIP lebih meningkatkan Audit Kinerja terhadap kegiatan penyidikan dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Personel yang dimutasikan ke jajaran Itwasda Polda Sumbar sebagai Parik/Auditor belum seluruhnya memiliki kompetensi di bidang auditing;
- c. Masih adanya beberapa pengawasan melekat para Kasatwil kepada satuan bawah dirasakan lemah sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran disiplin anggota serta penyimpangan pelaksanaan tugas;
- d. Basih adanya belum kesesuaian realisasi/penyerapan anggaran dengan perencanaan anggaran masing-masing satker dalam program dan kegiatan dapat berdampak pada pencapaian target kinerja dengan output kegiatan yang berkualitas menjadi belum optimal;
- e. Perencanaan kinerja yang sering mengalami perubahan menyulitkan satker dalam mempedomani penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- f. Adanya penugasan yang bersifat tumpang tindih antara tugas yang telah dijadwalkan secara rutin dengan penugasan yang sifatnya kontijensi/darurat.

II. Tujuan dan Sasaran

3. Visi dan Misi

a. Visi Polda Sumatera Barat dan Visi Itwasda Polda Sumbar

1) Visi Polda Sumatera Barat

“Terwujudnya Sumatera Barat yang aman dan tertib”.

2) Visi Itwasda Polda Sumatera Barat

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan, Audit, Reviu dan Klarifikasi secara professional”.

b. Misi

b. Misi Polda Sumatera Barat dan misi Itwasda Polda Sumatera Barat

1) Misi Polda Sumatera Barat

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut :

- a) **Melindungi** keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat Sumatera Barat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azazi manusia;
- b) **Melayani** kepentingan masyarakat di Sumatera Barat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- c) **Mengayomi** dengan selalu berusaha memberikan contoh yang terbaik pada masyarakat Sumatera Barat, agar masyarakat Sumatera Barat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik.

2) Misi Itwasda Polda Sumatera Barat

sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, maka langkah pencapaian sasaran strategis disusun dalam misi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;
- b) Melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
- c) Melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Melaksanakan reviu atas laporan keuangan, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi AKIP, evaluasi Penilaian Mandiri Penyusunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi Zona Integritas (ZI) diharapkan menghasilkan laporan yang berkualitas;

e) Meningkatkan

- e) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan.

4. Tujuan jangka menengah

a) Tujuan Polda Sumatera Barat

- 1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Barat;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Mewujudkan Polri Polda Sumbar yang Profesional;
- 4) Modernisasi pelayanan Polri Polda Sumbar;
- 5) Menerapkan manajemen Polri Polda Sumbar yang terintegrasi.

b) Tujuan Itwasda Polda Sumatera Barat

- 1) Meningkatkan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional;
- 2) Terlaksananya kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu sehingga dapat memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektifitas pencapaian tugas dan fungsi Polda Sumbar;
- 3) Terselenggaranya kegiatan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru secara transparan dan akuntabel;
- 4) Terselenggaranya kegiatan reviu dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan sehingga menghasilkan laporan satker yang berkualitas;
- 5) Terselenggaranya pelayanan dumas dan terselesainya dumas secara baik, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat.

5. Sasaran

5. Sasaran Prioritas Tahun 2023

- a) Sasaran prioritas Polda Sumatera Barat tahun 2023
 - 1) Memantapkan kinerja Harkamtibmas guna menciptakan rasa aman ditengah masyarakat;
 - 2) Mengoptimalkan kualitas Pelayanan Publik Polri;
 - 3) Penegakan Hukum yang Transparan dalam rangka meningkatkan kepercayaan Publik;
 - 4) Meningkatkan Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri;
 - 5) Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang modern;
 - 6) Penguatan pengawasan yang efektif guna menguatkan integritas dan Tatakelola Organisasi yang baik
- b) Sasaran prioritas Itwasda Polda Sumatera Barat tahun 2023
 - a) Menjadikan personel APIP yang berkualitas dan professional;
 - b) Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efisien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi;
 - c) Setiap Kasatker dan Kasatwil yang akan melaksanakan serah terima jabatan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pada bidang opsional, SDM, sarpras, dan keuangan;
 - d) Seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini;
 - e) Setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti.

III. Arah kebijakan dan strategi Tahun 2023

6. Arah kebijakan dan strategi Polda Sumbar Tahun 2023

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Sumbar Tahun 2023, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a) Arah

- a) Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Memantapkan Kinerja Harkamtibmas guna Menciptakan Rasa Aman di Tengah Masyarakat”, yaitu:
- 1) meningkatkan peran Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan situasi gangguan Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65, 130,131);
 - (b) melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya; (giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5,10, giat16,33,34, renaksi60,61,62,63,64,65, 130,131);
 - (c) mengembangkan manajemen operasi Baintelkam Polri; (giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/progHarkamtibmas/SP1/ SS1/ IKU1/PPKprog5,10,giat16,33,34,renaksi60,61,62,63,64,65, 130,131);
 - 2) menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas dan terorisme melalui kegiatan pencegahan yang proaktif; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa / kelurahan / Nagari; (giat 5076/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat12, 14, renaksi51,55);
 - (b) meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi; (giat5076/ progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU1/ PPKprog5, giat16, renaksi65);
 - (c) penggalangan

- (c) penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan teroris yang sudah pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat yang berpaham radikal; (giat5076/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat12, 15, renaksi 46,47,56,57,59);
 - (d) menetralsir dan menekan isu serta berita negatif yang dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas; (giat3149/ progDukma/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog13, giat43, renaksi 151,152);
 - (e) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan; (giat3149/ progDukma/ SP1/ SS1/IKU1/PPK prog5, giat12,renaksi 46,51,160,161);
 - (f) meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas; (giat3130/ progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi48);
 - (g) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian dan rawan kejahatan; (giat3130/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat12, renaksi48);
 - (h) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata; (giat3131/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat12, renaksi50,51);
- 3) meningkatkan kegiatan "Pemolisian Prediktif" dalam rangka Harkamtibmas untuk mendukung penanganan Covid-19 saat "New Normal" dengan melibatkan peran aktif masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam; (Giat5076/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat21, renaksi79,80);

(b) peningkatan

- (b) peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus; (giat5076/progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/IKU1/PPKprog5,giat21, renaksi79,80);
 - (c) pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dalam rangka mengembangkan program “kampung tangguh” dan asistensi penguatan KBPPP; (giat3133/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/IKU1/ PPKprog5,giat12, renaksi46,47,51);
 - (d) melanjutkan pelaksanaan Sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas; (giat3133/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5,6, giat 12,23, renaksi49,91);
- 4) melaksanakan penanganan konflik secara humanis; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) pemberian Penyuluhan Kontra Radikal Kepada Ormas/Komunitas guna berpartisipasi meredam gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial; (giat3112/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat16,ren aksi60,64,65);
 - (b) mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis; (giat5076/ progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat14, renaksi54,55);
- 5) meningkatkan Kamseltibcarlantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli Lantas; (giat3130,3133/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat12, renaksi49);
 - (b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas; (giat 3130,3133/ progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8, giat12,27,28,renaksi49,107,112);

c) meningkatkan.....

- (c) meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas; (giat3133/ progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12, 27,renaksi49,50,107);
- 6) meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di wilayah rawan gempa dan bencana; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) personel Brimob Polri yang mampu digerakkan dalam menghadapi ketanggapsegeraan serta membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan bencana, keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta wabah; (giat5087/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat19, 20,32 renaksi74,78,129);
- (b) menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara, Brimob dan bantuan Satwa; (giat 3130,5081,5087/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPK prog5, giat19,20,32, renaksi74,78,129);
- (c) memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa dan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pascabencana; (giat5076/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog9, giat30, renaksi123);
- (d) bersama instansi terkait bekerja sama dalam penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan gempa dan bencana; (giat3072,5076/ progDukma,4/ SP1/ SS1/IKU1/ PPKprog5,giat32,ren aksi 31,129);
- 7) melaksanakan kegiatan pengamanan event nasional dan internasional; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

(a) penanggulangan

- (a) penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta mengoptimalkan kekuatan Brimob Polri dan fungsi kepolisian lainnya yang mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pembangunan IKN serta saat event nasional/internasional berlangsung; (giat 5080, 5087/ progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog5,giat18,renaksi73,116);
 - (b) melaksanakan pengamanan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali; (giat3130, 3133/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPK prog5, giat18, renaksi73);
 - (c) melaksanakan operasi kepolisian dan kegiatan pengamanan masyarakat pada event nasional/internasional tahun 2023; (giat3130,3133,5087/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat18, ren aksi73);
 - (d) melaksanakan pengamanan pembangunan Ibu Kota Negara baru (IKN) di Kalimantan; (giat3130,3133, 5087/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPK prog9, giat30, renaksi116);
- 8) meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan back up kewilayahan dalam rangka pengamanan unjuk rasa; penanganan konflik sosial; dan menjalin sinergisitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) mengkoordinasikan kesiapan personel Polri untuk mampu digerakkan secara cepat dalam rangka pengamanan Ibu Kota Negara baru (IKN); (giat3130,5076,5087/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog9 giat30,renaksi116);
 - (b) melaksanakan dan mengkoordinasikan kontinjensi dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme; (giat 3130, 5076,5087/ progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog10,giat17,renaksi66);
 - (c) melaksanakan.....

- (c) melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi; (giat5087/progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat17, renaksi69);
 - (d) membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif; (giat5076,5087/progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat19,20,renaksi74,78);
 - (e) melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat; (giat3130,3131,3133/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPK prog5,giat19,20,renaksi74,78);
 - (f) tergelarnya personel di kawasan Obvitnas dan objek tertentu; (giat3131/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5,8,giat 12,27, renaksi50,51,107);
 - (g) melaksanakan kegiatan pelayanan pelacakan dan penangkalan; (giat5081/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat12,30, renaksi50,120);
 - (h) memperkuat Binmas Noken dengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas; (giat5076/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat14, renaksi54,55);
- 9) meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Harkamtibmas; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) melaksanakan kerja sama antara Polri dan Pemda/Lembaga dalam rangka meningkatkan sinergi polisional; (giat3120/progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5,giat20, renaksi78);
 - (b) meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam menjalankan program kontra radikalisme, kontra ideologi, kontra propaganda dan moderasi beragama; (giat3120,5076/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat 16, Renaksi62);

10) meningkatkan.....

- 10) meningkatkan penggelaran patroli kapal Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan perairan dan penegakan hukum; (giat3134,4342/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat12, renaksi48);
- 11) melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) pembinaan pelayanan fungsi Sabhara; (giat,3130/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPKprog5, giat18, renaksi70);
 - (b) penyelenggaraan pengamanan objek vital; (giat3130,3131/ progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU1/ PPK prog5,giat18,renaksi70);
 - (c) penanggulangan keamanan dalam negeri; (giat5087/ progHarkamtibmas/ SP1/SS1/IKU1/ PPKprog5,giat18, renaksi70);
 - (d) penindakan tindak pidana umum; (giat3142/ progLidikSidik/ SP1/SS1/IKU1/ PPKprog5,giat18,ren aksi70);
- 12) meningkatkan penguatan Polri di wilayah keamanan pulau berpenghuni; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) membangun kemampuan operasional Brimob Polri dalam penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi di wilayah pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan pengawasan (preemptif, preventif dan melakukan penegakan hukum awal) terhadap keluar masuknya orang dan barang di wilayah PLBN baik darat maupun laut; (giat,3130,5087,3134/ progHarkamtibmas/ SP1/ SS1/ IKU1/ PPK prog5, giat12, renaksi48,50);

(b) meningkatkan

- (b) meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas, Obvit/ Obvitnas dalam rangka penguatan Polri di bidang keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni; (giat3130,3131/ progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPK prog5,giat12,ren aksi48);
 - (c) meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan dalam rangka penguatan Polri di bidang keamanan pulau berpenghuni; (giat5081/ progHarkamtibmas/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi48);
- b. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polri”, yaitu:
- 1) modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta Pelayanan Keliling di Bidang Lalu Lintas yang lebih menjangkau masyarakat dan pelayanan identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;(giat3133/progHarkamtibmas,progAlmatsusSarprasPolri/ SP2/ SS2/ IKU1, IKP4b/ PPKprog4,11, giat9,10,37,40, renaksi33, 37,38,135,141,142,144);
 - (b) meningkatkan pengembangan registrasi dan identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan Pengemudi dan kendaraan bermotor; (giat3133 / progHarkamtibmas/ SP2/ SS1/ IKU1/ PPKprog 4,11, giat 9,10,37,40, renaksi 33,37,38,135,141,142,144);
 - (c) melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi guna mempercepat penerapan standar pelayanan minimal di lokasi afirmatif (menguatkan) di kawasan perbatasan; (giat3133,3071 / progHarkamtibmas, progdukma/ SP2/ SS4/ IKP4b/ PPKprog 11, giat37,38, renaksi135,136,137,139);
 - 2) meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) melakukan

- (a) melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan SKCK online, SIM dan STNK; (giat3112,3133/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS4/ IKP4b/PPKprog11, giat40,renaksi141,142,144);
 - (b) melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran dan kesehatan Polri pada Dokkes jajaran; (giat3072/ progDukma/ SP2/SS5/IKP5e/PPKprog3,giat8,renaksi31);
 - (c) mengoptimalkan operator (Out Sourching) untuk Helpdesk Support aplikasi Binmas Online System (BOS); (giat5076/ progHarkamtibmas/ SP2/SS4/IKP4d/PPKprog5,giat14 renaksi54,55);
 - (d) meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan Intelkam Polri melalui layanan drivethru perpanjangan SKCK dan layanan SKCK delivery di 34 Polda dan jajaran Polres; (giat3084,3133/ progAlmatusSarprasPolri, progHarkamtibmas/ SP2/ SS4/ IKP4b/ PPKprog11, giat40, renaksi141,144);
- 3) meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang online dan humanis serta berbasis TIK; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; (giat5051/ progDukma/ SP2/SS4/ IKP4/ PPKprog4,giat10,renaksi 39,40);
- 4) mengoptimalkan quick response kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban; (giat5081/ progHarkamtibmas/SP2/SS1/IKU1/PPKprog9,giat32, renaksi123);
 - (b) meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit; (giat3130,3131/ progHarkamtibmas/ SP2/SS1/ IKU1/ PPKprog5,8, giat12,27,renaksi50,107);
 - (c) mengelola

- (c) mengelola kegiatan respon time di Samapta Mabes Polri dan kewilayahan; (giat3130/ progHarkamtibmas/ SP2/ SS1/ IKU1/ PPKprog5,9,giat 12,30,renaksi 48,117);
- c. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penegakan Hukum yang Transparan dalam Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”, yaitu:
- 1) meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) meningkatkan koordinasi keamanan laut antarpensidik di wilayah perairan Indonesia; (giat3134,4342/ progLidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2/ PPKprog6, giat23, renaksi84);
 - (b) meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan dengan prioritas tindak pidana korupsi (pencegahan dan asset recovery), narkoba (TPPU), Karhutla/LH serta siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak; (giat3140,3142,3144,3151,3145,3146,5083, progLidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2/ PPKprog6, giat23, renaksi85,86,87,88,94,95,98);
 - (c) meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan, energi, investasi/perbankan (sektor keuangan); (giat3145/ progLidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2/ PPKprog6, giat23, renaksi86);
 - (d) melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan dan keadilan; (giat3140/ progLidikSidik/ SP3/SS2/IKU2/ PPKprog6,giat23,Ren aksi84);
 - (e) penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime) yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat; (giat3151/ progLidikSidik/ SP3/ SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,ren aksi88);
 - (f) meningkatkan

- (f) meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring; (giat3130,5083/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23, renaksi92,93);
 - (g) mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya yang menjadi perhatian publik serta memberikan kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional; (giat3140/ progLidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2/ PPKprog6, giat23, Renaksi89,90);
 - (h) memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti. (giat4343/ progLidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2/ PPKprog6, giat23, ren aksi96);
- 2) melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di era 4.0; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri; (giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/ SP3/ SS3/ IKP1/ PPK prog6, giat23, renaksi93);
 - (b) meningkatkan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan Inafis) dalam pengelolaan TKP; (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP3/SS3/IKP2/PPK prog6,giat23,renaksi93,96);
- 3) mewujudkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) memberikan SP2HP2 kepada pembuat pengaduan masyarakat guna meminimalisir komplain dari masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka; (giat3137,5086/ progLidikSidik/ SP3/ SS2/ IKU2/ PPKprog16, giat51 renaksi176,177);
 - b) mengoptimalkan.....

- (b) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan peran Birowassidik guna mengawasi proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (giat5086/progLidikSidik/SP3/SS2/IKU2/PPKprog14,giat47,ren aksi162,163);
 - (c) mengoptimalkan e-MP (e-Manajemen Penyidikan) sebagai sarana pengawasan dan transparansi; (giat5086/ progLidikSidik/ SP3/SS2/IKU2/ PPKprog6, giat23, ren aksi97);
- d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”, yaitu:
- 1) meningkatkan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) upgrading dan sertifikasi gadik/instruktur; (giat3100/progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3b/ PP Kprog3, giat4, renaksi11,13,14);
 - (b) pelaksanaan latihan harkatpuan fungsi Dalmas dan Negosiator yang Worldclass Standar; (giat3100/ prog Profesionalisme SDM Polri/ SP1/ SS1/ IKU3b/ PPK prog3, giat4, Renaksi14);
 - (c) pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang “Worldclass Standar”; (giat 3100, 5076, 3130, 5087/ prog Profesionalisme SDM Polri, Harkamtibmas/ SP4/ SS3/ IKP3b/ PPKprog3, giat4renaksi14,16);
 - (d) peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang Worldclass Standar; (giat3100,3151, prog Profesionalisme SDM Polri, LidikSidik/ SP4/ SS3/ IKP3b/ PPKprog3, giat4, renaksi14);
 - (e) sertifikasi profesi anggota Polri serta meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Polair Korpolairud Baharkam Polri serta Korlantas Polri; (giat3100/ prog Profesionalisme SDM Polri/ SP4/ SS3/ IKP3b/ PPKprog6, giat23, renaksi93);

f) desentralisasi.....

- (f) desentralisasi pendidikan pengembangan spesialisasi untuk fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Sabhara ke SPN Polda; (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3b/ PPK prog3, giat4, renaksi13);
 - (g) pelatihan manajemen operasional Polsek yang Worldclass Standar; (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3b/ PPK prog3, giat4, renaksi14);
- 2) mengoptimalkan penggunaan aplikasi Analisis Beban Kerja (ABK), SIK3 dan pengembangan struktur organisasi Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker; (giat5052/ progDukma/ SP4/ SS5/ IKP5d/ PPKprog2, giat3, renaksi6, 7);
 - (b) pengembangan struktur organisasi Polri pada tingkat Satuan Kewilayahan dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3; (giat5052/ progDukma/ SP4/ SS5/ IKP5d/ PPKprog1, giat1,2,ren aksi2,3,4)
 - (c) mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker guna pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian kelembagaan, baik bidang pembinaan maupun bidang operasional; (giat5052/ progDukma/ SP4/ SS5/ IKP5d/ PPKprog2, giat3, renaksi6, 7);
 - (d) melanjutkan penyusunan manajemen talenta persiapan kader unggul yang dapat berkompetitif; (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3a/ PPK prog3, giat5, renaksi18);
 - (e) melanjutkan penyiapan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas dari praktik KKN; (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/SS3/IKP3a/PPK prog3,giat5,renaksi21);

3) meningkatkan.....

- 3) meningkatkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) melaksanakan rekrutmen anggota Polri secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (Affirmative Action, Talent Scouting dan Reward); (giat3107/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3a/ PPK prog3, giat4, renaksi8,9);
 - (b) merencanakan seleksi Dikbang pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk meningkatkan kompetensinya tahun 2023 sebanyak 12.072 orang terdiri dari Lemhanas 10 orang, Sespimti 75 orang, Sespimmen 150 orang, Sespimma 200 orang, S1 STIK-PTIK 175 orang, S3 STIK-PTIK 15 orang, S2 STIK-PTIK 20 orang, S2 MSDM 20 orang, SIP 1.500 orang, PAG Ba ke Pa 2.000 orang, PAG Ta ke Ba 100 orang, PKN I 15 orang, PKN II 70 orang, PKA 100 orang, PKP 100 orang, UDKP/PI PNS 300 orang, Dikbangspes Fungsi Teknis 6.492 orang, Dikbangspes Pengamanan Perbatasan 100 orang dan Intel ke luar negeri 30 orang; (giat3107/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3a/ PPK prog3, giat4, renaksi11);
 - (c) meningkatkan kemampuan/skill Bhabinkamtibmas dan pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial secara humanis yang terjadi dimasyarakat di bidang Kamtibmas; (giat3100,5076/ progProfesionalismeSDMPolri, Harkamtibmas/ SP3/ SS3/ IKP3b/ PPKprog3, giat4, renaksi16);
- 4) meningkatkan perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) melaksanakan perintisan kerja sama pendidikan Dagri dan Lugri; (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3b/ PPK prog3,giat6,renaksi24);
 - (b) melaksanakan perpanjangan MoU kermadik Dagri dan Lugri; (giat3100/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3b/ PPK prog3, giat6,renaksi24,25);

c) kerja.....

- (c) kerja sama dengan lembaga/asosiasi sertifikasi dalam dan luar negeri; (giat3100,3120, / progProfesionalismeSDMPolri, prog Harkamtibmas/ SP4/ SS3/ IKP3b/ PPKprog3, giat6, renaksi24,25);
 - (d) merencanakan rekrutmen pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada untuk kebutuhan organisasi secara proaktif, bersih, transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT), dengan rencana target pemenuhan personel (rekrutmen) tahun 2023 sebanyak 25.625 orang terdiri dari Akpol 175 orang, SIPSS 100 orang, Bintara 20.800 orang, Tamtama 3.200 orang dan CPNS 1.350 orang; (giat3107/progProfesionalismeSDMPolri/SP4/SS3/IKP3a/PPK prog3,giat4,renaksi8,9);
- 4) meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah; (giat3100/ progProfesionalismeSDM, progModernisasiAlmatsus SarprasPolri/ SP4/ SS3/ IKP3a/ PPKprog3, giat4, renaksi13,14);
 - (b) peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri; (giat3072,3100/progDukma,ProfesionalismeSDM/SP4/SS3/IKP3a/ PPKprog3,giat4,renaksi11,14);
- 5) melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta meningkatkan "sistem reward and punishment"; (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3a/ PPK prog3, giat5, renaksi23);

b) membangun.....

- (b) membangun sistem penilaian kompetensi Polri (kompetensi teknis, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi etik) yang komprehensif melingkupi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung “program manajemen talenta”; (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3a/ PPK prog3, giat5, renaksi22);
 - (c) optimalisasi Sistem Manajemen Kinerja online dengan SIPP; (giat3108/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP3a/ PPK prog3, giat5, renaksi18,20,21);
 - (d) meningkatkan jumlah asesor sertifikasi kompetensi bidang Satpam dan Polsus; (giat3100,3108,5076/ progProfesionalismeSDMPolri, Harkamtibmas/ SP4/SS3/IKP3a/ PPKprog3,giat4,ren aksi13);
- 6) meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) meningkatkan pelayanan administrasi berkaitan dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama; (giat3072/ progDukma/ SP4/ SS5/ IKP5e/ PPKprog3, giat8, renaksi 30,31,32);
 - (b) mengoptimalkan pelayanan secara proaktif dalam pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polri yang gugur/tewas dalam tugas; (giat3072,3105/ progDukma, progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/ SS3/ IKP5e/ PPKprog3, giat8, renaksi32);
 - (c) melaksanakan pelayanan administrasi pegawai pada Polri berkaitan dengan Asabri; (giat3105/ progProfesionalismeSDMPolri/ SP4/SS3/IKP5e/PPK prog3,giat8,renaksi29);
 - (d) peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;(giat3072/progDukma,progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP4/ SS3/ IKP5e/ PPKprog3, giat8, renaksi 30,31);

e) peningkatan.....

- (e) peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara melalui standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS); (giat3072/ progDukma, progAlmatsusSarprasPolri/ SP4/ SS3/ IKP3a/ PPKprog4, giat10, renaksi31,103);
- e. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern”, yaitu:
 - 1) memenuhi sarana dan prasarana dan Almatsus Polri yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) melanjutkan pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online; (giat3071/progModernisasiAlmatsusSarprasPolri,progDukma/ SP5/SS4/IKP4b/PPKprog4,giat9,10,renaksi 34,39,40);
 - (b) pembangunan dan meningkatkan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan, baik pada tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan yang prima kepada aparaturnya Polri dan masyarakat umum; (giat 5062/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP5/ SS4/ IKP4b/ PPKprog3, giat8, renaksi 30,31);
 - (c) melanjutkan pembangunan gedung BPKB dan STNK online; (giat3084/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP5/ SS4/ IKP4b/ PPKprog11, giat40, renaksi141);
 - (d) mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri serta jaringan Palapa Ring dari Kemenkominfo RI untuk koneksi Polda-Mabes; (giat3071/ progDukma, progModernisasiAlmatsusSarpras Polri/ SP5/ SS4/ IKP4d/ PPKprog4, giat9, renaksi34);
 - (e) melanjutkan pengembangan 110; (giat 3084 / progDukma, progModernisasiAlmatsusSar prasPolri/ SP5/ SS4/ IKP4a/ PPKprog4, giat9, renaksi36);

f) mengoptimalkan.....

- (f) mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi dengan online single submission dalam penerbitan surat izin opsional BUJP; (giat3071/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP 5/SS4/ IKP4b/ PPKprog5, giat14, renaksi54);
 - (g) melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks); (giat5051/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP5/ SS4/ IKP4b/ PPKprog4, giat10, renaksi37,38);
- 2) membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi; (giat3084/ progModernisasiAlmatsusSarprasPolri/ SP5/ SS4/ IKP4/ PPKprog4a, giat9, renaksi34);
 - (b) melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline kepolisian dengan nomor tunggal dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan masyarakat; (giat5062/ progDukma, progModernisasiAlmatsusSarpras Polri/ SP5/ SS1,4/ IKP4a/ PPKprog4a, giat9, renaksi36);
- f. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Penguatan Pengawasan yang Efektif Berbasis Teknologi Informasi guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Bersih”, yaitu:
- 1) menguatkan penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis online; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
 - (a) klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara terpadu; (giat3091, 3089, 3090/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5g/ PPKprog12, giat42, Ren aksi150);
 - (b) mengoptimalkan kerjasama sistem penanganan pengaduan masyarakat secara online terpadu dan berbasis TI;

- (giat3091,3090,3089,3120/ progDukma, progHarkamtibmas/ SP6/ SS5/ IKP5g/ PPKprog15, giat50, Renaksi174);
- (c) percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang berasal dari pengawas eksternal; (giat3091/ progDukma/ SP6/SS5/ IKP5g/ PPKprog15, giat49, Ren aksi172);
- (d) pemasangan perangkat keras (Hardware) dan perangkat lunak (Software) terkait rekrutmen Pendidikan pembentukan serta terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik; (giat3091/ progDukma/ SP6/ SS4,5/ IKP4b/ PPKprog15,giat50Ren aksi175);
- 2) mengoptimalkan Saber Pungli di lingkungan internal Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) penerapan Perpol Nomor 2 Tahun 2022 tentang Waskat segera sampaikan ke Fungsi Propam Polda dan Polres jajaran dengan pedomani setiap pelaksanaannya guna memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi pelanggaran anggota Polri; (giat3090/ progDukma/ SP6/SS5/IKP5g/PPK/PPKprog15,giat48Ren aksi168);
- (b) meningkatkan sinergisitas Pokja Satgas Saber Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda dalam memberantas pungli; (giat3091/ progDukma/SP6/SS5/IKP5g/ PPK/PPKprog15,giat48Ren aksi169);
- (c) membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara Satgas dan UPP; (giat3091/ progDukma/ SP6/ SS4/ IKP4b/ PPKprog15, giat48, Renaksi, 168,169);
- (d) meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam mencegah pungli; (giat3091/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5e/ PPKprog15, giat49Ren aksi170,172);
- (e) mendorong pelaksanaan pelayanan publik secara online; (giat3091/ progDukma/ SP6/SS5/ IKP5e/ PPKprog11, giat37Ren aksi135);

f) melaksanakan.....

- (f) melaksanakan pengamanan guna memperkuat kehadiran fungsi Propam pada tempat rawan pelanggaran, baik kegiatan, personel dan baret; (giat3089, 3090/ prog5/ SP6/ SS5/ IKU5g/ PPKprog15, giat48, Renaksi 168,169);
 - (g) pelaksanaan operasi bersih terkait penanganan perkara pidana dan pelayanan publik; (giat3089,3090/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKU5g/ PPKprog16, giat51, Renaksi 176, 177);
 - (h) terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polri; (giat3089,3090/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5g/ PPKprog15, giat48, Renaksi169);
- 3) meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan korupsi; (giat3089,3090,3091/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5d/ PPKprog15, giat 49, Renaksi170,173);
 - (b) meningkatkan kualitas dan kapabilitas APIP dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi; (giat3068,3091/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5b/ PPKprog15, giat48, Ren aksi 168,169);
 - (c) melanjutkan sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; (giat3091/ progDukma/ SP6/SS5/ IKP5d/ PPKprog14, giat47, Ren aksi165);

4) meningkatkan.....

- 4) meningkatkan tatakelola manajemen kinerja perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) mengembangkan aplikasi e-Jakstra terkait perencanaan dan penganggaran Polri; (giat5051/ progDukma/ SP6/SS5/ IKP5f/ PPKprog4, giat10, Renaksi 38,39);
 - (b) meningkatkan sinergisitas dalam e-Jakstra guna menyusun produk perencanaan Polri (Domren Kapolri dan Renja Polri) guna menyelaraskan pembangunan di Polri agar semakin berkualitas; (giat5051/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5f/ PPKprog14, giat47,Ren aksi163);
 - (c) meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi logistik, fungsi keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung jawab tatakelola keuangan pada tingkat Satker; (giat3068,3091/ progDukma/SP6/SS5/IKP5c/PPKprog15,giat48, Renaksi168);
 - (d) melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Polri semester dan tahunan; (giat3068,3091/ prog1/ SP6/ SS5/ IKP5f/ PPKprog14, giat47, Renaksi163);
 - (e) melaksanakan Analisis dan Evaluasi Kinerja dan anggaran baik di bidang Pembinaan dan Operasional; (giat3068,3091/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5f/ PPKprog14, giat47, Renaksi162);
- 5) menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap serta mengubah kewenangan Polsek hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan); (giat5052/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5d/ PPKprog1, giat1, Renaksi 1,2);

b) penguatan.....

- (b) penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya termasuk pengembangan wilayah Papua; (giat5052/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5d/ PPKprog1, giat1, Ren aksi3);
 - (c) melanjutkan penyempurnaan peraturan tentang SOTK tingkat Mabes Polri; (giat5052/ prog1/SP4/ SS5/ IKP5d/ PPKprog1, giat2, Renaksi4,5);
- 6) meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- (a) menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara pelayanan publik di seluruh unit kerja Polri untuk memedomani kebijakan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari seluruh masyarakat/stakeholder terkait kebijakan penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat; (giat5053/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5d/ PPKprog11, giat38, Ren aksi 139,140);
 - (b) melanjutkan kegiatan asistensi penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit pelayanan publik Polres/Polresta/Polrestabes dan Polres Metro, sesuai dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dalam rangka perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks pelayanan publik Polri; (giat5053/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5d/ PPKprog11, giat138, Ren aksi140);
 - (c) melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45 inovasi pelayanan publik;

(giat5053/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5d/ PPKprog11, giat38, Renaksi 136,139,140);

- (d) mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas berpredikat WBK dan WBBM; (giat5053/ progDukma/ SP6/ SS5/ IKP5d/ PPKprog11, giat39, Renaksi140);
- (e) melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata Kelola (ITK) Polri berbasis web dan mobile secara online (ITK-O) tingkat Polres Metro/Polrestabes/Polresta/Polres dan Satker Polda; (giat5053/ progDukma/ SS5/ IKP5d/ PPKprog11,12, giat39,41,Ren;
- (f) memberikan bantuan dan nasehat hukum kepada Polri, anggota Polri dan keluarga besar Polri dalam menghadapi permasalahan hukum baik konsultasi maupun beracara di pengadilan (giat 3154/progDukma/SS5/IKP5f).

7. Arah kebijakan dan strategi Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Itwasda Polda Sumbar Tahun 2023, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Menjadikan personel APIP yang berkualitas dan professional”, yaitu:
 - 1) Melaksanakan peningkatan kemampuan APIP yang berkualitas dan professional dengan mengikuti diklat secara bertahap dan berkesinambungan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
Terselenggaranya Bimtek (Prog WA, giat 3073)
 - 2) Mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran gaji dan tunjangan personel;

untuk

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Melaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan perosnel; (Prog WA, giat 3073)

- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar menjadi taat, hemat, efisien, dan efektif dalam pencapaian tugas dan fungsi”, yaitu:

- 1) melaksanakan kegiatan Audit Kinerja dan Audit dengan Tujuan Tertentu aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan

b) Terselenggaranya Audit Kinerja

c) Terselenggaranya Audit dengan tujuan tertentu

- 2) Pemeliharaan kantor/pemeliharaan peralatan dan mesin.

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan kendaraan (Prog BP, giat 5059).

- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ setiap Kasatker dan Kasatwil yang akan melaksanakan serah terima jabatan dapat mempertanggungjawabkan kinerja pada bidang opsnal, SDM, sarpras, dan keuangan”, yaitu:

melaksanakan kegiatan Verifikasi terhadap adanya mutasi kepala satuan kerja ketempat yang baru sehingga pelaksanaan kinerja pejabat yang lama dapat dipertanggungjawabkan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Terselenggaranya Verifikasi (Prog WA, giat 3091);

d. Arah

- d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ seluruh satker dan satwil jajaran Polda Sumbar yang direviu dan evaluasi sehingga laporan dapat diyakini”, yaitu:

melaksanakan reviu atas laporan keuangan, reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), evaluasi AKIP, evaluasi Penilaian Mandiri Penyusunan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan evaluasi Zona Integritas (ZI) diharapkan menghasilkan laporan yang berkualitas;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Terselenggaranya reviu dan evaluasi (Prog WA, giat 3073);

- e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “ setiap pengaduan masyarakat yang dilaporkan baik langsung maupun tidak langsung dapat ditindak lanjuti”, yaitu:

Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan melakukan, klarifikasi, konfirmasi, pemeriksaan dan penelitian setiap pengaduan;

untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Prog WA, giat 3091)

IV. Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif T.A. 2023

8. Program dan Kegiatan

- a. **Program BP** modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri.

1) Tujuan:

Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi sarana dan prasarana aparaturnya Polri khususnya pada Itwasda Polda Sumbar guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi pembinaan dan operasional.

2) Kegiatan

- 2) Kegiatan:
 - a) Dukungan manajemen dan teknis sarpras.

b. **Program WA** dukungan manajemen.

- 1) Tujuan:

Terwujudnya good governance dan clean government melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran serta integrasi lintas sector.
- 2) Kegiatan:
 - a) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
 - b) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan.

9. Pagu Indikatif Itwasda Polda Sumbar TA. 2023.

Alokasi pagu indikatif Itwasda Polda Sumbar TA. 2023 sebesar Rp. 4.334.336.000,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Program modernisasi almatsus dan sarana prasarana Polri Rp.109.162.000,- (Seratus sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) meliputi :
 - 1) Dukungan manajemen dan teknik sarpras Rp.109.162.000,-(Seratus sembilan juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- b. Program dukungan manajemen Rp. 4.225.174.000,- (empat milyar dua ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) meliputi :
 - 1) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri Rp. 3.330.159.000,- (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 2) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan Rp.895.015.000 (delapan ratus sembilan puluh lima juta lima belas ribu rupiah).

V. PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Itwasda Polda Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan T.A. 2023.

Ditetapkan di: Padang
pada tanggal: 23 Agustus 2022

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542



**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Lampiran

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

RKKT

KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/14/VIII/REN.2.3./2022 TANGGAL 23 AGUSTUS 2022

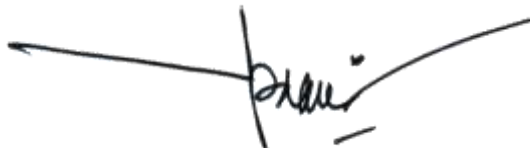
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
ITWASDA POLDA SUMBAR TA 2023

SASARAN STRATEGI		INDIKATOR KINERJA		TARGET	KET
SS1	Profesionalisme SDM Itwasda Polda Sumbar	IKU1	Indeks Profesionalitas SDM Itwasda Polda Sumbar	47	
		IKP2	Terselenggaranya diklat profesi oleh BPKP	14	
		IKP3	Terselenggaranya Bimtek	1	
SS2	Modernisasi teknologi Itwasda Polda Sumbar	IKP4	Persentase Pemenuhan Ketersediaan ADK pada Almatsus Itwasda Polda Sumbar	60%	
SS3	Sistem pengawasan Itwasda Polda Sumbar yang akuntabel guna mendukung tata Kelola pemerintah yang bersih dan melayani	IKP5	Nilai SAKIP	72,00	
		IKP6	Nilai Kinerja Anggaran	93,00	
		IKP7	Terselenggaranya Audit Kinerja	2	
		IKP8	Terselenggaranya Audit Tujuan Tertentu	17	
		IKP9	Terselenggaranya Verifikasi	27	
		IKP10	Terselenggaranya Reviu dan Evaluasi	5	
IKU11	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	95%			

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 23 Agustus 2022

INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR



ARIF RAHMAN HAKIM, S.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 66050542

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA BARAT
INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH



**RENCANA KERJA
ITWASDA POLDA SUMBAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

RKA-KL

KEPUTUSAN INSPEKTUR PENGAWASAN DAERAH POLDA SUMBAR
NOMOR: KEP/14/VIII/REN.2.3./2022 TANGGAL 23 AGUSTUS 2022

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,334,336,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
060.01.BP	Program Modernisasi Almsatus dan Sarana Prasarana Polri			109,162,000	
5059	Dukungan Manajemen dan Teknik Sarpras			109,162,000	
5059.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan		109,162,000	

	Lokasi : KOTA PADANG				
5059.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		109,162,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			109,162,000	
AY	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10			86,800,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang)			86,800,000	RM
	- Kendaraan Roda 4	7.0 UNIT	12,400,000	86,800,000	
BB	PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2			9,000,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang)			9,000,000	RM
	- Kendaraan Roda 2	4.0 UNIT	2,250,000	9,000,000	
BH	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR			13,362,000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.010-Padang)			13,362,000	RM
	- Pemeliharaan Personel Komputer	6.0 UNIT	730,000	4,380,000	
	- Pemeliharaan Printer	15.0 UNIT	463,000	6,945,000	
	- Mesin Foto Copy	1.0 UNIT	2,037,000	2,037,000	
060.01.WA	Program Dukungan Manajemen			4,225,174,000	
3073	Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri			3,330,159,000	
3073.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan		3,330,159,000	

	Lokasi : KOTA PADANG				
3073.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Layanan		136,432,000	
003	Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan			136,432,000	
AD	RAPAT-RAPAT KOORDINASI/KERJA/DINAS/PIMPINAN KELOMPOK KERJA/KONSULTASI			13,761,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.010-Padang)			13,761,000	RM
	> RAPAT KLARIFIKASI PENANGANAN DUMAS			6,930,000	
	- Makan [15 ORG x 11 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	165.0 OK	25,000	4,125,000	
	- Snack/Kudapan [15 ORG x 11 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	165.0 OK	17,000	2,805,000	
	> KONSULTASI/KOORDINASI BERSAMA INSTANSI TERKAIT			4,536,000	
	- Makan [18 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	108.0 OK	25,000	2,700,000	
	- Snack/Kudapan [18 ORG x 6 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	108.0 OK	17,000	1,836,000	
	> RAKERNIS FUNGSI PENGAWASAN			2,295,000	
	>> DUK SNACK/KUDAPAN		0	2,295,000	
	- Snack/Kudapan [135 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI	135.0 OK	17,000	2,295,000	
AG	SOSIALISASI			1,360,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,334,336,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			1,360,000	RM
	> SOSIALISASI DIPA RKA K/L			1,360,000	
	- Snack/Kudapan [40 ORG x 1 GIAT x 2 KALI]	80.0 OK	17,000	1,360,000	
BU	<u>EVALUASI/LAPORAN KEGIATAN</u>			48,095,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			23,819,000	RM
	> REVIU LAPORAN KEUANGAN			16,604,000	
	- Snack/Kudapan [145 ORG x 2 GIAT x 3 HARI x 1 KALI]	870.0 OK	17,000	14,790,000	
	- DUK GIAT REVIU LAPKEU [1 GIAT]	1.0 GIAT	1,814,000	1,814,000	
	> REVIU LKIP POLDA			744,000	
	>> SNACK/KUDAPAN		0	272,000	
	- Snack/Kudapan [8 ORG x 1 GIAT x 2 HARI x 1 KALI]	16.0 OK	17,000	272,000	
	>> ATK		0	472,000	
	- KERTAS A4 [6 RIM x 1 KALI]	6.0 RIM	52,000	312,000	
	- TINTA [2 BTL x 1 KALI]	2.0 BTL	80,000	160,000	
	> REVIU/REVISI RKA K/L			1,938,000	
	- Snack/Kudapan [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	114.0 OK	17,000	1,938,000	
	> EVALUASI/PENILAIAN SAKIP			2,238,000	
	>> DUK SPANDUK		0	300,000	
	- Spanduk [1 BUAH x 1 GIAT]	1.0 LMBR	300,000	300,000	
	>> DUK SNACK/KUDAPAN		0	1,938,000	
	- Snack/Kudapan [114 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	114.0 OK	17,000	1,938,000	
	> EVALUASI ZI			2,295,000	
	>> DUK SNACK/KUDAPAN		0	2,295,000	
	- Snack/Kudapan [135 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	135.0 OK	17,000	2,295,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.010-Padang)			24,276,000	RM
	> EVALUASI SERTA PELAKSANAAN PENILAIAN ZI			24,276,000	
	- Penginapan [4 ORG x 1 GIAT x 7 RES x 1 MALAM]	28.0 OH	367,000	10,276,000	
	- Uangan harian [4 ORG x 1 GIAT x 7 RES x 2 HARI]	56.0 OH	250,000	14,000,000	
DX	<u>PENINGKATAN KEMAMPUAN PERSONEL SATKER</u>			9,236,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			3,836,000	RM
	> BINTEK LHKPN			2,244,000	
	- SNACK/KUDAPAN [132 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	132.0 OG	17,000	2,244,000	
	> BINTEK FUNGSI PENGAWASAN			1,592,000	
	>> DUK SPANDUK		0	300,000	
	- Spanduk	1.0 LMBR	300,000	300,000	
	>> DUK SNACK		0	1,292,000	
	- Snack/Kudapan [76 ORG x 1 GIAT x 1 HARI x 1 KALI]	76.0 OK	17,000	1,292,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,334,336,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.010-Padang) > BIAYA NARASUMBER - Biaya narasumber/pemapar [6 ORG x 1 GIAT x 1 JAM]	6.0 OJ	900,000	5,400,000	RM
E	<i>PENYUSUNAN PROGRAM, ANGGARAN, DAN RENCANA KERJA</i>			782,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang) > PENYUSUNAN RENCANA KERJA >> ATK - KERTAS A4 [4 RIM x 1 KALI] - TINTA [2 BTL x 1 KALI] - JILID [10 BUKU x 1 KALI] - MAP BIOLA [2 PACK x 1 KALI]	4.0 RIM 2.0 BTL 10.0 BUKU 2.0 PACK	52,000 80,000 30,000 57,000	782,000 208,000 160,000 300,000 114,000	RM
F	<i>PENYUSUNAN RKA-K/L DAN DIPA</i>			2,016,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang) > PENYUSUNAN PAGU DAN DATA PENDUKUNG >> ATK - KERTAS A4 [4 RIM x 4 KALI] - TINTA [2 BTL x 4 KALI] - MAP BIOLA [1 PACK x 4 KALI] - PULPEN [2 KOTAK x 4 KALI] - MATERAI [11 BUAH]	16.0 RIM 8.0 BTL 4.0 PACK 8.0 KOTAK 11.0 BH	52,000 80,000 57,000 23,000 12,000	2,016,000 2,016,000 832,000 640,000 228,000 184,000 132,000	RM
FS	<i>DUKUNGAN OPERASIONAL SATKER</i>			26,340,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang) > TAKLIMAT AWAL DAN AKHIR AUDIT KINERJA - DUK GIAT [6 GIAT] - Snack/Kudapan [70 ORG x 6 GIAT x 1 HARI]	6.0 GIAT 420.0 OG	3,200,000 17,000	26,340,000 19,200,000 7,140,000	RM
G	<i>PENYUSUNAN EVALUASI LKIP</i>			826,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang) > PENYUSUNAN EVALUASI LKIP ITWASDA >> Duk Snack - Snack/Kudapan [10 ORG x 1 GIAT x 1 KALI] >> ATK - KERTAS A4 [3 RIM x 1 KALI] - TINTA [4 BTL x 1 KALI] - JILID [6 BUKU x 1 KALI]	10.0 OK 3.0 RIM 4.0 BTL 6.0 BUKU	17,000 52,000 80,000 30,000	826,000 170,000 170,000 656,000 156,000 320,000 180,000	RM
JZ	<i>HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN</i>			33,360,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,334,336,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.010-Padang)			33,360,000	RM
	- Honor Operator SIRENA dan E-monev [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honor PPK [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,800,000	21,600,000	
	- Honor Pejabat Pengadaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	680,000	8,160,000	
TV	<u>PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA</u>			656,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang)			656,000	RM
	> PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022			656,000	
	>> ATK		0	656,000	
	- KERTAS A4 [3 RIM x 1 KALI]	3.0 RIM	52,000	156,000	
	- TINTA [4 BTL x 1 KALI]	4.0 BTL	80,000	320,000	
	- JILID [6 BUKU x 1 KALI]	6.0 BUKU	30,000	180,000	
3073.EBA.994	Layanan Perkantoran			3,193,727,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,133,707,000	U
A	<i>Pembayaran gaji dan tunjangan</i>			3,133,707,000	
511161	<u>Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			258,515,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	1.0 THN	217,923,000	217,923,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	20,296,000	20,296,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	20,296,000	20,296,000	
511169	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			6,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	1.0 THN	4,000	4,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,000	1,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,000	1,000	
511171	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			12,935,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	1.0 THN	11,087,000	11,087,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	924,000	924,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	924,000	924,000	
511172	<u>Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			7,540,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	1.0 THN	6,458,000	6,458,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	541,000	541,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	541,000	541,000	
511173	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			35,700,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	1.0 THN	30,600,000	30,600,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,550,000	2,550,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,334,336,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511175	<u>Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			2,105,000	RM
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	1.0 THN	1,779,000	1,779,000	
	- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	163,000	163,000	
	- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	163,000	163,000	
511176	<u>Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			9,225,000	RM
	- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	1.0 THN	9,225,000	9,225,000	
511179	<u>Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			62,004,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	1.0 THN	62,004,000	62,004,000	
511193	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			2,520,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	1.0 THN	2,160,000	2,160,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	180,000	180,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	180,000	180,000	
511211	<u>Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			1,463,551,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	1.0 THN	1,215,745,000	1,215,745,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	123,903,000	123,903,000	
	- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	123,903,000	123,903,000	
511219	<u>Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			19,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	1.0 THN	15,000	15,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,000	2,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,000	2,000	
511221	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			105,872,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	1.0 THN	90,746,000	90,746,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 13)	1.0 BLN	7,563,000	7,563,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI (gaji 14)	1.0 BLN	7,563,000	7,563,000	
511222	<u>Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			34,559,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	1.0 THN	29,621,000	29,621,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 13)	1.0 BLN	2,469,000	2,469,000	
	- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI (gaji 14)	1.0 BLN	2,469,000	2,469,000	
511223	<u>Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			236,810,000	RM
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	1.0 THN	202,980,000	202,980,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	16,915,000	16,915,000	
	- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	16,915,000	16,915,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,334,336,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511225	<u>Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			25,373,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI	1.0 THN	21,747,000	21,747,000	
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,813,000	1,813,000	
	- Belanja Tunjangan PPh TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	1,813,000	1,813,000	
511226	<u>Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			109,583,000	RM
	- Belanja Tunjangan Beras TNI/POLRI	1.0 THN	109,583,000	109,583,000	
511228	<u>Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			669,600,000	RM
	- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	1.0 THN	669,600,000	669,600,000	
511232	<u>Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI</u> (KPPN.010-Padang)			5,600,000	RM
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI	1.0 THN	4,800,000	4,800,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 13)	1.0 BLN	400,000	400,000	
	- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI/POLRI (gaji ke 14)	1.0 BLN	400,000	400,000	
511244	<u>Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri</u> (KPPN.010-Padang)			13,650,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	1.0 THN	11,700,000	11,700,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 13)	1.0 BLN	975,000	975,000	
	- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri (gaji ke 14)	1.0 BLN	975,000	975,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.010-Padang)			78,540,000	RM
	> UANG LEMBUR			35,376,000	
	- Golongan II [2 ORG x 2 JAM x 11 HARI x 12 BLN]	528.0 OJ	17,000	8,976,000	
	- Golongan III [5 ORG x 2 JAM x 11 HARI x 12 BLN]	1320.0 OJ	20,000	26,400,000	
	> UANG MAKAN LEMBUR			33,660,000	
	- Golongan II [2 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	264.0 OH	35,000	9,240,000	
	- Golongan III [5 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	660.0 OH	37,000	24,420,000	
	> UANG MAKAN LEMBUR POLRI			9,504,000	
	- Golongan II [1 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	132.0 OH	35,000	4,620,000	
	- Golongan III [1 ORG x 11 HARI x 12 BLN]	132.0 OH	37,000	4,884,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			60,020,000	
<i>BW</i>	<i>PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR</i>			<i>60,020,000</i>	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.010-Padang)			60,020,000	RM
	- Bekal kantor	40.0 OT	1,500,500	60,020,000	
3091	<u>Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan</u>			895,015,000	
3091.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	79.0 Dokumen		895,015,000	
3091.EBD.965	Lokasi : KOTA PADANG <u>Layanan Audit Internal</u>	79.0 Dokumen		895,015,000	
003	<u>Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan</u>			895,015,000	
<i>CU</i>	<i>PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN</i>			<i>830,102,000</i>	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,334,336,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.010-Padang) > ATK PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN - PULPEN - PULPEN BOLINER - PENSIL 2B - TINTA PRINTER - KERTAS A4 - CETAK BUKU KERTAS KERJA - JILID - KERTAS F4 [1 RIM]			3,710,000 3,710,000 180,000 201,000 225,000 720,000 520,000 910,000 900,000 54,000	RM
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.010-Padang) > BELANJA PERJALNAN DINAS BIASA DUK TRANSPORTASI LAUT/KAPAL - Duk Transportasi Laut/Kapal pemeriksaan dan pengawasan [4 ORG x 10 GIAT x 1 RES] > BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN >> PAMEN / PNS GOL.IV - Penginapan Pamen [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM - Uang Harian Pamen [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI - Transportasi Pamen [2 ORG x 2 GIAT x 18 RES x 1 KALI >> PAMA / PNS GOL.III - Penginapan Pama [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM - Uang Harian Pama [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI - Transportasi Pama [2 ORG x 2 GIAT x 18 RES x 1 KALI >> BINTARA / PNS GOL.II - Penginapan Bintara [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 1 MALAM - Uang Harian Bintara [2 ORG x 6 GIAT x 18 RES x 2 HARI - Transportasi Bintara [2 ORG x 2 GIAT x 18 RES x 1 KALI			752,892,000 24,000,000 24,000,000 728,892,000 243,612,000 104,652,000 120,960,000 18,000,000 242,640,000 103,680,000 120,960,000 18,000,000 242,640,000 103,680,000 120,960,000 18,000,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.010-Padang) > BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN - Uang harian pemeriksaan dan pengawasan [5 ORG x 7 GIAT x 14 STKR x 1 HARI			73,500,000 73,500,000 73,500,000	RM
JZ	<u>HONORARIUM SAI/SAKPA/SIMAK/SMAP/PENGELOLA KEUANGAN</u>			64,913,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023

KEMEN/LEMB (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
UNIT ORG (01) Kepolisian Negara Republik Indonesia
UNIT KERJA (678232) ITWASDA POLDA SUMBAR
ALOKASI Rp. 4,334,336,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.010-Padang)			64,913,000	RM
	> HONOR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAN OPERATOR			64,913,000	
	- Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,900,000	22,800,000	
	- Honor Pejabat Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	709,450	8,513,000	
	- Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	700,000	8,400,000	
	- Honor Staf Pengelola Keuangan [6 ORG x 12 BLN]	72.0 OB	300,000	21,600,000	
	- Honor Operator Persediaan [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	
	- Honor Operator Aset [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	150,000	1,800,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
 2. P = Komponen Penunjang
 3. * = Blokir

PADANG, 13 Agustus 2022

ARIF RAHMAN HAKIM,S.H.
 KOMBESPOL 66050542